

**PERAN BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PERKOTAAN  
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**EKA PUSPITA NINGRUM  
2216011042**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PERAN BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PERKOTAAN  
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh**

**EKA PUSPITA NINGRUM**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada**

**Jurusan Sosiologi**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## **ABSTRAK**

### **PERAN BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh**

**EKA PUSPITA NINGRUM**

Penelitian ini membahas peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di wilayah perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Bandar Lampung, menganalisis dampak penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi lembaga dalam menjalankan fungsi pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya melalui pembentukan UPZ di masjid serta penyaluran dana dalam bentuk bantuan konsumtif dan program produktif. Namun, penyaluran masih didominasi oleh bantuan konsumtif (70%), sehingga peran transformatif untuk mengubah mustahik menjadi muzaki belum optimal. Dana ZIS bermanfaat dalam meringankan beban keluarga miskin, mendukung pendidikan, dan menopang usaha kecil, tetapi masih terbatas dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Hambatan utama meliputi keterbatasan operasional, infrastruktur teknologi yang minim, kapasitas SDM yang belum merata, serta rendahnya penghimpunan dana dibandingkan kebutuhan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan program produktif, optimalisasi jaringan sosial berbasis masjid, dan pengembangan sistem monitoring agar peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** BAZNAS, zakat, pemberdayaan ekonomi, masyarakat miskin

**ABSTRACT****THE ROLE OF BAZNAS IN BANDAR LAMPUNG CITY IN ECONOMIC  
EMPOWERMENT OF THE POOR IN URBAN AREAS  
(A STUDY IN BANDAR LAMPUNG CITY)****By****EKA PUSPITA NINGRUM**

*This research examines the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City in empowering the urban poor. The objectives are to analyze the role of BAZNAS, assess the impact of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) distribution on improving the welfare of poor communities, and identify the challenges faced by the institution in implementing economic empowerment programs. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation.*

*The findings indicate that BAZNAS Bandar Lampung has attempted to fulfill its role by establishing Zakat Collection Units (UPZ) in mosques, distributing consumptive assistance and providing productive. However, the distribution is still dominated by consumptive aid (70%), which limits the transformative function of turning mustahik (beneficiaries) into muzakki (zakat payers). The distribution of ZIS funds has eased the financial burden of poor families, supported children's education, and sustained small-scale businesses, yet its impact on long-term economic independence remains limited. The main challenges include operational constraints, limited technological infrastructure, uneven human resource capacity, and relatively low fundraising compared to the needs of mustahik. This study highlights the importance of strengthening productive programs, optimizing mosque-based social networks, and developing monitoring and evaluation systems to enhance the effectiveness of BAZNAS in empowering the urban poor sustainably.*

**Keywords:** *BAZNAS, zakat, economic empowerment, poor community*

Judul skripsi

: **PERAN BAZNAS KOTA BANDAR  
LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI  
WILAYAH PERKOTAAN (STUDI DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: **Eka Puspita Ningrum**

Nomor Pokok Mahasiswa

**2216011042**

Program Studi

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Drs. Suwarno, M.H.**

**NIP. 19650616 199103 1 003**

**2. Ketua Jurusan Sosiologi**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bartoven', is written over the text of the second supervisor.

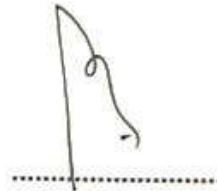
**Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.**

**NIP. 19770401 200501 2 003**

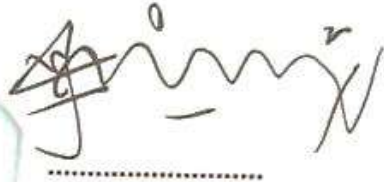
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : Drs. Suwarno, M.H.



Penguji : Drs. Pairul Syah, M.H.



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197608212006032001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 September 2025**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 30 September 2025

Yang membuat pernyataan,

Eka Puspita Ningrum

NPM 2216011042

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Eka Puspita Ningrum yang dilahirkan di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 September 2003. Anak tunggal dari pasangan Bapak Nanang Junaedi dan Ibu Misnati. Berkewarganegaraan Indonesia dengan asal Suku Jawa, serta menganut agama islam.

Penulis menembuh pendidikan di SD Negeri 1 Braja Indah dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Way Jepara dan lulus pada tahun 2019, serta melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Way Jepara dan lulus pada tahun 2022. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu berkuliah di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis tergabung sebagai anggota Kajian Intelektual (KI) di Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi (HMJ Sosiologi). Pada bulan Januari-Februari tahun 2025 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cempaka Timur, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung selama empat bulan dari bulan Maret-Juli 2025.

## MOTTO

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya

**(QS. Al-Baqarah:286)**

Jangan pernah menyerah pada mimpi yang telah Anda kejar hampir sepanjang  
hidup Anda

**(Park Jimin)**

Bahkan jika kamu tersandung dan jatuh, hal terpenting adalah kamu harus bangun  
kembali *“future gonna be okay”*

**(Min Yoongi)**

Berusahalah demi dirimu sendiri, karena hanya diri sendiri yang tahu sebesar apa  
usahamu

**(2521)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran BAZNAS Kota Bandar Lampung Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Wilayah Perkotaan (Studi Di Kota Bandar Lampung)” Karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan kasih sayang serta rasa terima kasih kepada:

### **Keluargaku**

Teruntuk Bapak Nanang Junaedi dan Ibu Misnati, Nenek Sih Atun dan Kakek Ngadi, serta seluruh keluarga penulis. Penulis menyampaikan terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan Yang Senantiasa mengiringi, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dan menjadi langkah menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

### **Guru dan Dosen**

Terima kasih penulis sampaikan atas bimbingan, pengetahuan, ruang pengembangan diri, dan pengalaman berharga bagi penulis, yang akan menjadi bekal berharga bagi langkah penulis selanjutnya.

### **Sahabat**

Terima kasih untuk dukungan dan lelucon sederhana yang kerap menimbulkan kegembiraan, tawa, serta suasana riuh.

### **Jurusan tercinta**

Sosiologi FISIP Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya sangat diharapkan di hari kemudian. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas doa dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berperan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi berjudul “Peran BAZNAS Kota Bandar Lampung Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Wilayah Perkotaan (Studi di Kota Bandar Lampung)”. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam perancangan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis senantiasa memperoleh kemudahan, kesadaran, serta keberhasilan dalam menjalani kehidupan. Ucapan syukur juga ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan utama dalam setiap langkah kehidupan;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H. selaku dosen penguji skripsi penulis sekaligus Pembimbing Akademik di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung. terima kasih penulis sampaikan atas segala ilmu, kesempatan, dan pengalaman berharga yang telah diterima;

6. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas bimbingan dan ilmu yang diberikan, yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik;
7. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis sampaikan terima kasih atas ilmu dan pelajaran yang telah diberikan, serta atas kontribusinya dalam memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
8. BAZNAS Kota Bandar Lampung terima kasih telah memberikan kesempatan berharga untuk melaksanakan magang sekaligus penelitian. Melalui pengalaman tersebut, penulis memperoleh banyak ilmu, wawasan, serta pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan penulis
9. Teristimewa, kepada Bapak Nanang Junaedi dan Ibu Misnati tercinta, yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan tak henti memberikan doa serta dukungan dalam setiap langkah penulis. Berkat cinta dan pengorbanan beliau, penulis mampu sampai pada titik ini. Doa dan restu beliau akan selalu menjadi penuntun dalam perjalanan hidup penulis.
10. Nenek Sih Atun dan kakek Ngadi, terima kasih untuk semua dukungan, doa dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
11. Kepada adik sepupu penulis, Vera terimakasih selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dan terimakasih sudah menjadi bagian indah dari cerita hidup penulis serta kepada Adik Habib dan Adik Qiana yang penulis sayangi;
12. Kepada sobat seperjuangan Selva, Nisa dan Ulfia terimakasih atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang begitu berarti selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian menjadi bagian dari cerita indah dan perjalanan penulis di bangku perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.
13. Kepada Leny, Afi, Cansya, Cici, Jelis, Tika, Cindy, Dinda terima kasih telah menjadi teman terbaik dan selalu memberikan dukungan kepada penulis sejak di bangku SMA;
14. Rekan-rekan *Socientic* Smansawara terimakasih telah menjadi teman sekaligus saudara dalam kehidupan penulis di masa SMA.

15. Rekan-rekan Sosiologi 22 terima kasih atas Kebersamaan, dukungan, serta kerja sama yang tercipta selama masa perkuliahan;
16. Pihak-pihak yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu penulis selama menyelesaikan skripsi dan masa studi yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu;
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung;

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan cinta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang namanya tertulis maupun tidak tertulis di dalam karya ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. Namun, besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun bagi para pembaca yang berkenan menyelaminya. penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan salam hangat kepada semua yang telah memberikan doa, dukungan, dan inspirasi sepanjang perjalanan ini.

Bandar Lampung, 30 September 2025

Penulis,

Eka Puspita Ningrum

## DAFTAR ISI

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                          | <b>iii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>     | <b>vii</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                   | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                           | <b>ix</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                     | <b>x</b>     |
| <b>SANWACANA .....</b>                       | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                      | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                     | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                    | <b>xviii</b> |
| <b>I. PENDAHULUAN.....</b>                   | <b>1</b>     |
| 1.1. Latar Belakang .....                    | 1            |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                    | 8            |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                 | 8            |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                | 9            |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>             | <b>10</b>    |
| 2.1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)..... | 10           |
| 2.1.1 Pengertian BAZNAS .....                | 10           |
| 2.1.2 Fungsi BAZNAS .....                    | 11           |
| 2.1.3 Landasan Hukum BAZNAS.....             | 12           |
| 2.1.4 Zakat, Infak dan Sedekah .....         | 15           |
| 2.1.5 Program-Program BAZNAS .....           | 22           |
| 2.2. Pemberdayaan Ekonomi .....              | 23           |
| 2.2.1 Pengertian Pemberdayaan .....          | 23           |
| 2.2.2 Konsep Pemberdayaan Ekonomi .....      | 25           |
| 2.3. Masyarakat Miskin .....                 | 27           |
| 2.3.1. Definisi Masyarakat.....              | 27           |
| 2.3.2. karakteristik Kemiskinan.....         | 28           |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.3. Jenis-Jenis Kemiskinan .....                                                       | 30        |
| 2.3.4. Kemiskinan diperkotaan.....                                                        | 32        |
| 2.4. Landasan Teori .....                                                                 | 34        |
| 2.4.1. Teori Modal Sosial.....                                                            | 34        |
| 2.5. Penelitian Terdahulu .....                                                           | 38        |
| 2.6. Kerangka Pikir.....                                                                  | 43        |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>                                                       | <b>44</b> |
| 3.1. Jenis Penelitian .....                                                               | 44        |
| 3.2. Fokus Penelitian .....                                                               | 45        |
| 3.3. Lokasi Penelitian .....                                                              | 46        |
| 3.4. Sumber data.....                                                                     | 46        |
| 3.4.1. Sumber Data Primer.....                                                            | 46        |
| 3.4.2. Sumber data Sekunder .....                                                         | 47        |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data .....                                                        | 47        |
| 3.5.1. Wawancara/interview.....                                                           | 47        |
| 3.5.2. Observasi.....                                                                     | 48        |
| 3.5.1. Dokumentasi.....                                                                   | 49        |
| 3.6. Teknik Analisis Data.....                                                            | 49        |
| 3.6.1. Reduksi Data .....                                                                 | 50        |
| 3.6.2. Penyajian Data.....                                                                | 50        |
| 3.6.3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan .....                                              | 50        |
| <b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>                                          | <b>51</b> |
| 4.1. Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung .....                                             | 51        |
| 4.2. Logo dan Visi Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung .....                                  | 52        |
| 4.3. Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....                                   | 54        |
| 4.4. Tugas Dan Fungsi Kepengurusan BAZNAS Kota Bandar Lampung.....                        | 55        |
| <b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                      | <b>60</b> |
| 5.1. Hasil Penelitian.....                                                                | 60        |
| 5.1.1 Profil Informan .....                                                               | 60        |
| 5.1.2 Peran BAZNAS Kota Bandar Lampung .....                                              | 63        |
| 5.1.3 Dampak Penyaluran Dana ZIS .....                                                    | 74        |
| 5.1.4 Hambatan Yang Dialami BAZNAS Kota Bandar Lampung .....                              | 87        |
| 5.2. Pembahasan.....                                                                      | 89        |
| 5.2.1 Peran BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ..... | 89        |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.2.2 Dampak Penyaluran Dana ZIS Pada Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin .....                | 95         |
| 5.2.3 Hambatan Yang Dialami BAZNAS Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Miskin..... | 99         |
| <b>VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                                            | <b>103</b> |
| 6.1. Kesimpulan .....                                                                                          | 103        |
| 6.2. Saran .....                                                                                               | 105        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                     | <b>107</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                          | <b>111</b> |

## DAFTAR TABEL

### Daftar Tabel

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 1.1  | Jumlah Penduduk Miskin di Lampung .....   | 4  |
| 1.2  | Jumlah Penghimpunan Dana ZIS .....        | 6  |
| 1.3  | pendistribusian dana ZIS Tahun 2021 ..... | 7  |
| 1.4  | pendistribusian dana ZIS Tahun 2022 ..... | 7  |
| 1.5  | pendistribusian dana ZIS Tahun 2023 ..... | 7  |
| 2.1. | Penelitian Terdahulu .....                | 39 |
| 5.1. | Data Informan .....                       | 64 |

## DAFTAR GAMBAR

### Daftar Gambar

|      |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| 2.1. | Kerangka Berpikir .....                             | 44 |
| 4.1. | Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung .....               | 53 |
| 4.2. | Wilayah yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....  | 56 |
| 4.3. | Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung..... | 56 |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan adalah persoalan sosial yang rumit dan hampir dialami oleh seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Isu ini merupakan permasalahan mendasar yang hingga kini tetap menjadi fokus utama perhatian pemerintah pemerintah di setiap negara (Johan, 2020). Kemiskinan muncul akibat faktor internal dalam suatu negara serta pengaruh kondisi ekonomi global. Hubungan saling ketergantungan antarnegara dalam bidang ekonomi memang membawa manfaat, namun juga menimbulkan tantangan baru. Situasi ini membuat banyak negara merasa cemas terhadap prospek perekonomian mereka di masa depan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi persoalan penting yang wajib ditangani oleh setiap pemerintah karena dampaknya yang buruk terhadap berbagai aspek kehidupan.

Kemiskinan berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, menghambat terciptanya masyarakat yang berdaya saing, menimbulkan tekanan sosial ekonomi, serta berpotensi memicu tindakan kriminal. Menurut Suparlan (1984), kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau kelompok mengalami keterbatasan dalam kepemilikan harta benda yang bernilai. Kekurangan tersebut membuat seseorang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Ketidakmampuan ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup aspek budaya seperti pelaksanaan upacara adat, nilai moral, dan etika, serta kebutuhan sosial seperti pendidikan hingga hubungan dengan sesama (Johan, 2020).

Kemiskinan bisa terjadi karena adanya dua kondisi, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah muncul karena keterbatasan sumber daya alam, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta terjadinya bencana alam. Sementara itu, kemiskinan buatan disebabkan oleh peran lembaga-lembaga dalam masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial, yang membuat sebagian orang tidak memiliki akses terhadap sarana ekonomi dan fasilitas yang ada. Akibatnya, kelompok masyarakat yang tidak mampu menguasai sarana dan fasilitas tersebut akan tetap berada dalam kondisi miskin (Suyanto, 2001).

Kemiskinan merupakan persoalan penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Selama ini, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai langkah. Upaya tersebut antara lain dengan menambah alokasi anggaran bagi program-program yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, mendorong pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota untuk meningkatkan porsi APBD dalam penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja pada tahun-tahun berikutnya, serta mempertahankan sejumlah program yang sudah berjalan seperti Raskin, BOS, Asuransi Kesehatan untuk masyarakat miskin, dan lainnya (Sugito et al., 2018). Upaya pemerintah memang telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia, tetapi jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro, penurunan tersebut masih tergolong rapuh. Selama ini, strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia berlandaskan pada konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yakni memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan pokok, terutama makanan. Menurut BPS, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (BPS 2020).

Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024, mencapai 24,06 juta orang atau setara dengan tingkat kemiskinan 8,57%, berdasarkan

data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2025). Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 24,06 juta jiwa, turun 1,16 juta jiwa dibandingkan Maret 2024 dan berkurang 1,84 juta jiwa dibandingkan Maret 2023. Persentase ini merefleksikan penurunan sebesar 0,46 persen dari Maret 2024 serta 0,79 persen dari Maret 2023. Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin mencapai 11,05 juta jiwa atau menurun 0,59 juta jiwa dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 11,64 juta jiwa. Sementara itu, di pedesaan jumlah penduduk miskin juga turun dari 13,58 juta jiwa pada Maret 2024 menjadi 13,02 juta jiwa pada September 2024, atau berkurang sebesar 0,57 juta jiwa (BPS, 2024).

Masalah kemiskinan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius di setiap daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Provinsi ini terdiri atas 13 kabupaten dan 2 kota. Menurut data BPS, pada tahun 2024 Lampung menempati posisi ke-15 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia (BPS, 2025). Tingkat kemiskinan antarwilayah di Provinsi Lampung dapat diketahui melalui jumlah penduduk miskin yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Lampung (Ribuan Jiwa), 2020-2024

| Wilayah         | Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) |        |        |        |        |
|-----------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 2020                                 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Lampung Barat   | 38,12                                | 39,36  | 36,20  | 34,73  | 33,43  |
| Tanggamus       | 70,37                                | 71,89  | 67,43  | 65,18  | 64,22  |
| Lampung Selatan | 143,33                               | 145,85 | 136,21 | 133,67 | 132,38 |
| Lampung Timur   | 153,57                               | 159,79 | 149,12 | 148,26 | 142,69 |
| Lampung Tengah  | 152,28                               | 155,77 | 143,34 | 140,29 | 137,41 |
| Lampung Utara   | 119,35                               | 121,91 | 114,67 | 107,21 | 105,91 |
| Way Kanan       | 58,41                                | 59,89  | 54,28  | 51,26  | 48,88  |
| Tulang Bawang   | 42,43                                | 44,53  | 39,19  | 37,83  | 37,46  |

|                     |          |          |          |        |        |
|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| Pesawaran           | 66,04    | 68,31    | 63,17    | 59,29  | 55,01  |
| Pringsewu           | 40,12    | 41,04    | 38,18    | 37,60  | 34,42  |
| Mesuji              | 14,72    | 15,24    | 13,88    | 13,71  | 12,91  |
| Tulang Bawang Barat | 20,29    | 23,03    | 20,72    | 20,32  | 20,35  |
| Pesisir Barat       | 22,24    | 23,23    | 21,85    | 21,45  | 20,21  |
| Bandar Lampung      | 93,74    | 98,76    | 90,51    | 87,08  | 83,88  |
| Metro               | 14,31    | 15,32    | 13,68    | 12,80  | 12,07  |
| Provinsi Lampung    | 1.049,32 | 1.083,93 | 1.002,41 | 970,67 | 941,23 |

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 1.1 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung tercatat mencapai 83,88 ribu jiwa atau 7,37% dari total populasi. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,07% dibanding tahun sebelumnya. Dari data tersebut, Bandar Lampung menempati posisi kelima dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Lampung. Hal ini menegaskan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang cukup serius di kota tersebut. Data ini juga menggambarkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kota maupun provinsi melalui penguatan program-program pengentasan kemiskinan.

Perlu adanya berbagai langkah dari pihak-pihak terkait untuk menekan tingkat kemiskinan guna mencapai tujuan pengentasannya. Upaya pengentasan kemiskinan merupakan tindakan yang bersifat ekonomi maupun kemanusiaan dengan tujuan membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait memiliki peranan yang sangat penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Salah satu lembaga yang berperan strategis dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS), yaitu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3, BAZNAS memiliki peran untuk menghimpun, menyalurkan, serta mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, keberadaan BAZNAS juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat agar manfaatnya lebih optimal, yakni guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan (PPID, 2024).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan lembaga yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), mulai dari tahap penghimpunan, penyaluran, hingga pendayagunaannya kepada para mustahik atau pihak yang berhak menerima zakat. Pembentukan BAZNAS di tingkat daerah ini telah diresmikan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 494/1.02/HK/2022 yang menetapkan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung periode 2022–2027, serta Surat Keputusan Walikota Nomor 490/1.02/HK/2022 yang mengangkat Dewan Pengawas BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk periode yang sama (BAZNAS Kota Bandar Lampung, 2020). BAZNAS Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 26, Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Dalam menjalankan tugasnya, setiap proses pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana ZIS untuk mustahik wajib disertai dengan pelaporan. Laporan tersebut memuat rincian dana yang berhasil dihimpun, disalurkan, serta diberdayakan, dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga kepada muzakki, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan.

Tabel 1.2 jumlah penghimpunan dana ZIS BAZNAS Bandar Lampung

| Penghimpunan | Jumlah pengumpulan ZIS |
|--------------|------------------------|
| Tahun 2021   | Rp. 3.451.237.933      |
| Tahun 2022   | Rp. 2.795.512.497      |
| Tahun 2023   | Rp. 3. 668.700.081     |
| Tahun 2024   | Rp. 3.921.596.644      |

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2024

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung tidak selalu menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, BAZNAS Kota Bandar Lampung tetap berkomitmen untuk menyalurkan dana tersebut kepada para mustahik di Kota Bandar Lampung. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS guna meningkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS Kota Bandar Lampung menerapkan dua pola pendayagunaan. Pertama, pola konsumtif (jangka pendek), yakni distribusi dana zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik untuk digunakan segera, sehingga sifatnya habis pakai dan tidak memberikan dampak ekonomi berkelanjutan. Kedua, pola produktif (jangka panjang), yaitu pendistribusian dana yang tidak habis dalam waktu singkat karena dimanfaatkan untuk kegiatan yang menimbulkan pengaruh ekonomi serta memberdayakan mustahik. Data terkait pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung pada periode 2021 hingga 2023 dapat dilihat berikut ini.

Tabel 1.3 pendistribusian dana ZIS Tahun 2021

| BIDANG      | PENDISTRIBUSIAN  | PENERIMA MANFAAT |
|-------------|------------------|------------------|
| Kemanusiaan | Rp 2.645.536.150 | 34.958 Penerima  |
| Ekonomi     | Rp 176.500.000   | 24 Penerima      |
| Pendidikan  | Rp 121.530.000   | 33 Penerima      |
| Kesehatan   | Rp 1.750.000     | 2 Penerima       |
| Keagamaan   | Rp 187.240.000   | 32 Penerima      |

Tabel 1.4 pendistribusian dana ZIS Tahun 2022

| BIDANG      | PENDISTRIBUSIAN  | PENERIMA MANFAAT |
|-------------|------------------|------------------|
| Kemanusiaan | Rp 2.150.874.905 | 30.054 Penerima  |
| Ekonomi     | Rp 17.000.000    | 3 Penerima       |
| Pendidikan  | Rp 66.900.000    | 25 Penerima      |
| Kesehatan   | Rp 3.850.000     | 5 Penerima       |
| Keagamaan   | Rp 281.985.000   | 239 Penerima     |

Tabel 1.5 pendistribusian dana ZIS tahun 2023

| BIDANG      | PENDISTRIBUSIAN  | PENERIMA MANFAAT |
|-------------|------------------|------------------|
| Kemanusiaan | Rp 2.693.570.015 | 29.134 Penerima  |
| Ekonomi     | Rp 0             | 0 Penerima       |
| Pendidikan  | Rp 26.200.000    | 11 Penerima      |
| Kesehatan   | Rp 6.350.000     | 11 Penerima      |
| Keagamaan   | Rp 483.426.000   | 361 Penerima     |

Sumber: pengumpulan dan pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2023.

Tabel di atas menyajikan data penyaluran dana ZIS serta jumlah penerima manfaat pada tahun 2021–2023. Berdasarkan data tersebut, BAZNAS Kota Bandar Lampung telah menyalurkan dana ZIS yang dihimpun ke berbagai sektor melalui sejumlah program yang dijalankan. Pada sektor kemanusiaan, terdapat program “Bandar Lampung Peduli” yang berfokus pada kegiatan sosial dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, BAZNAS melaksanakan program “Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan” berupa pemberian modal usaha, baik dalam bentuk dana maupun barang, kepada masyarakat perorangan maupun kelompok. Selanjutnya, pada sektor kesehatan terdapat program “Bandar Lampung Sehat” yang meliputi bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu serta fasilitas transportasi untuk keperluan berobat. Sementara itu, di bidang pendidikan BAZNAS menghadirkan program “Bandar Lampung Cerdas”, berupa pemberian beasiswa kepada pelajar dan santri yang membutuhkan serta bantuan perlengkapan belajar bagi siswa kurang mampu. Namun demikian, program bantuan modal usaha saat ini sudah tidak lagi berjalan.

BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari penyaluran dana ZIS. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung hingga saat ini masih relatif tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 poin ke-8 tentang tugas dan fungsi BAZNAS. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dengan judul “Peran BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Wilayah Perkotaan (Studi di Kota Bandar Lampung)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS Bandar Lampung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak penyaluran dana ZIS pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung?
3. Apa hambatan yang dialami BAZNAS dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Bandar Lampung?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran BAZNAS Bandar Lampung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Bandar Lampung.
2. Mengetahui dampak dari adanya penyaluran dana ZIS pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung.
3. Mengetahui hambatan yang dialami BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis. Dari aspek teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah dan sosial, terutama dalam menjelaskan mekanisme serta dampak penyaluran ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini turut memperluas kajian literatur mengenai peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi, sekaligus menghadirkan perspektif baru terkait strategi yang tepat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi BAZNAS Kota Bandar Lampung maupun lembaga pengelola zakat lainnya dalam menyusun program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkesinambungan. Dengan memahami kebutuhan serta hambatan yang dihadapi masyarakat miskin, BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat memaksimalkan distribusi dana ZIS sehingga memberikan dampak lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya peran sosial dalam menanggulangi kemiskinan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

#### 2.1.1 Pengertian BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan tersebut. Pembentukannya didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Tugas utama BAZNAS adalah mengelola penghimpunan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional.

Secara etimologis, istilah *amil* berasal dari kata '*amila-ya'malu* yang berarti bekerja atau melakukan suatu aktivitas. Dalam tata bahasa Arab, kata *amil* merupakan *ism fā'il* yang menunjukkan subjek atau pelaku dari suatu pekerjaan. Dengan demikian, *amil* dapat dimaknai sebagai seseorang yang melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dalam konteks zakat, *amil* termasuk salah satu dari delapan golongan (*asnāf*) yang berhak menerima bagian dari zakat. Menurut penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap Surat At-Taubah ayat 60, yang dimaksud dengan *amil zakat* adalah orang-orang yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) atau perwakilannya untuk mengurus zakat, baik dalam hal pengumpulan dari para muzakki maupun pengelolaannya. Tugas tersebut mencakup berbagai peran, mulai dari penggembala zakat hingga petugas administrasi, dengan syarat utama bahwa mereka adalah seorang

Muslim (Dahlan, 2020). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa Amil zakat adalah orang yang diberi tanggung jawab atau kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait pengelolaan zakat. Tugas tersebut mencakup administrasi, pelayanan muzakki dan mustahik, pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada pihak yang berhak. Selain itu, Amil zakat juga memiliki peran dalam memberikan arahan serta pendampingan agar dana zakat dapat berkembang, dimanfaatkan secara optimal, dan memberikan manfaat baik bagi muzakki maupun mustahik. BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dijalankan secara amanah, berlandaskan hukum, terintegrasi, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat).

### **2.1.2 Fungsi BAZNAS**

Tugas dan wewenang BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pada Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam menjalankan perannya, BAZNAS memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain mengelola zakat, BAZNAS juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur infak, sedekah, serta berbagai dana sosial keagamaan lainnya di tingkat nasional.

Zakat harus dikelola dengan profesional serta dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga pengelola zakat bersinergi dengan pemerintah agar zakat berfungsi sebagai sumber dana yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, edukasi, serta pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat.

BAZNAS tidak hanya bertugas mengelola zakat, tetapi juga mengelola dana yang bersumber dari infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta dicatat secara tertib dalam pembukuan. BAZNAS dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil untuk menjalankan tugasnya. Lalu dalam BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil, selain itu dapat juga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

### **2.1.3 Landasan Hukum BAZNAS**

Landasan hukum pertama yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang disahkan pada 23 September 1999. Lahirnya undang-undang ini merupakan wujud pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan

Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Tujuan utama ditetapkan aturan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai ajaran agama, memperkuat fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial, dan mengoptimalkan pemanfaatan zakat agar lebih efektif serta efisien (Nurjihad, 2001).

Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 sebagai aturan pelaksanaannya. Keputusan tersebut menegaskan pentingnya keberadaan lembaga atau organisasi pengelola zakat (amil) yang profesional, baik yang dibentuk oleh pemerintah dalam bentuk Badan Amil Zakat maupun yang didirikan oleh masyarakat (BPK RI, 1999).

Regulasi berikutnya yang mengatur pengelolaan zakat adalah Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Melalui keputusan tersebut, BAZNAS secara resmi dibentuk sebagai lembaga yang berperan sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. Berdasarkan Keppres ini, BAZNAS memiliki kewenangan dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Selain itu, aturan ini juga menegaskan keberadaan dua jenis lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat namun tetap berada dalam pengawasan pemerintah (BPK RI, 2001). Keberadaan BAZNAS berperan sebagai instrumen penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang lain yang mengatur mengenai pengelolaan zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Regulasi ini diterbitkan sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 sekaligus memperkuat kedudukan BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Menteri Agama (PPDI BAZNAS RI, 2024). Adapun beberapa ketentuan penting yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 antara lain:

- a) Pasal 5: menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
- b) pasal 6: menguraikan fungsi BAZNAS dalam perencanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.
- c) Pasal 7: menjelaskan tugas BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- d) Pasal 15: mengatur pembentukan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota.
- e) Pasal 16: mengatur tentang hubungan kerja antara BAZNAS pusat dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Selain aturan yang tertuang dalam regulasi formal, landasan hukum pengelolaan zakat dalam Islam juga terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban zakat adalah QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Hadis Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. menceritakan

bahwa ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang dipungut dari harta orang-orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka” (HR. Bukhari dan Muslim). Dari ayat dan hadis ini, kita mendapat petunjuk tentang mekanisme pengelolaan zakat, yakni dikumpulkan dari kalangan yang mampu kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (Mulyana, 2020).

#### **2.1.4 Zakat, Infak dan Sedekah**

##### **1. Pengertian Zakat**

Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, berkembang, berkah, dan baik. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Budaya & Nasution, 2021). Zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat tertentu yang wajib dikeluarkan sesuai ketetapan Allah untuk diberikan kepada yang berhak. Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat dan shalat ditegaskan dalam 82 ayat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat menempati posisi penting sebagai salah satu rukun Islam setelah shalat. Jika shalat melambangkan hubungan manusia dengan Allah, maka zakat merepresentasikan ikatan sosial antar sesama manusia (Fauzi, A., & Rahman, 2024).

Menurut ulama mazhab Hanbali, zakat diartikan sebagai kewajiban pada harta tertentu yang diperuntukkan bagi kelompok orang tertentu dan pada waktu tertentu. Akan tetapi, definisi ini hanya mencakup zakat harta dan tidak termasuk zakat fitrah. Hal tersebut karena istilah “harta tertentu” mengandung makna bahwa

harta tersebut harus mencapai nisab, sedangkan nisab merupakan salah satu syarat wajibnya zakat harta. (Iin Mutmain, 2020).

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Ia juga menegaskan bahwa zakat dapat dimaknai sebagai tindakan mengeluarkan sebagian harta tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak hanya merujuk pada kewajiban menyerahkan bagian harta tertentu, tetapi juga pada harta yang dikeluarkan itu sendiri (Iin Mutmain, 2020).

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban untuk menyalurkan sebagian harta yang telah memenuhi ketentuan tertentu, sesuai dengan aturan Allah SWT, kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Secara etimologis, kata zakat bermakna “suci” dan “terpuji”, yang menekankan pentingnya hubungan antar sesama manusia. Dalam ranah fikih, zakat dipandang sebagai kewajiban yang tidak dapat dihindari atas harta tertentu. Walaupun definisi tersebut lebih banyak menekankan zakat harta, namun zakat fitrah juga termasuk dalam cakupan konsep ini. Dalam ajaran Islam, zakat memiliki posisi istimewa sebagai salah satu pilar utama yang mencerminkan kepedulian sosial dan rasa empati terhadap orang lain.

## **2. Jenis-Jenis Zakat**

Dalam tradisi filantropi Islam, zakat menjadi salah satu bentuk amal yang memiliki peranan penting. Adapun beberapa jenis zakat yang umum dipraktikkan dalam konteks filantropi Islam adalah sebagai berikut:

### 1) Zakat maal

Secara etimologis, istilah *al-maal* berasal dari kata “*ala-yamilu-maylan-wa-mayalanan-wa-maylulatan-wa-mamilan*” yang memiliki makna miring, condong, cenderung, menyukai, merasa senang, dan memiliki rasa simpati (Manzhur, 1883:690). Harta dinamakan *al-maal* karena pada dasarnya setiap manusia, di mana pun dan kapan pun, memiliki kecenderungan untuk mencari kebahagiaan, pemenuhan keinginan, serta rasa cinta terhadap kekayaan. Sementara itu, zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dibayarkan pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat puasa, biasanya berupa bahan makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma.

Para ahli fikih memandang bahwa ukuran kemakmuran ditentukan oleh dua hal, yaitu nilai ekonomis serta manfaat atau hasil yang dapat diambil dari suatu benda. Kedua aspek tersebut sejalan dengan pengertian ‘harta’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan harta sebagai bentuk kekayaan, baik bersifat materi maupun non-materi, yang mempunyai nilai ekonomi.

#### a) Syarat Wajib Zakat Maal:

- (1) Islam
- (2) Baligh
- (3) Merdeka
- (4) Memiliki harta yang mencapai nisab.
- (5) Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul).

#### b) Nisab Zakat Maal

Nisab zakat maal berbeda-beda tergantung pada jenis hartanya. Berikut beberapa contoh nisab zakat maal:

- (1) Emas: 85 Gram emas murni.

- (2) Perak: 595 Gram perak murni.
- (3) Uang: setara dengan 85 Gram emas murni.
- (4) Hasil pertanian: 650 Kg gabah atau 520 Kg kurma.
- (5) Perdagangan: harta yang diperdagangkan dengan keuntungan 2,5% atau lebih.

c) Jenis-Jenis Zakat Maal

Zakat maal dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- (1) Zakat emas dan perak: zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang dimiliki.
- (2) Zakat uang dan surat berharga: zakat yang dikenakan atas uang dan surat berharga yang setara dengan emas.
- (3) Zakat perniagaan: zakat yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan.
- (4) Zakat hasil pertanian: Zakat yang dikenakan atas hasil panen pertanian.
- (5) Zakat peternakan: Zakat yang dikenakan atas hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba.
- (6) Zakat temuan: Zakat yang dikenakan atas harta yang ditemukan, seperti harta karun.

d) Perhitungan Zakat Maal

Cara menghitung zakat maal sendiri berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang akan dikeluarkan. Berikut ini adalah beberapa contoh cara menghitung zakat maal:

- (1) Zakat emas dan perak: 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki.
- (2) Zakat uang dan surat berharga: 2,5% dari nilai uang atau surat berharga yang dimiliki.

- (3) Zakat perniagaan: 2,5% dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.
- (4) Zakat hasil pertanian: 10% dari hasil panen pertanian jika panen dilakukan tanpa irigasi, dan 5% jika panen dilakukan dengan irigasi.
- (5) Zakat peternakan: Zakat peternakan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang dimiliki.
- (6) Zakat temuan: 20% dari nilai harta yang ditemukan.

## 2) Zakat Fitrah

Setiap muslim memiliki kewajiban menunaikan zakat pada akhir bulan Ramadan sebagai ungkapan syukur atas nikmat berpuasa. Zakat ini disebut zakat fitrah, yang umumnya diberikan dalam bentuk bahan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Istilah “fitrah” dikaitkan dengan jenis harta yang disalurkan kepada penerimanya, yakni berupa makanan. Kata ini juga berhubungan dengan istilah “*ifthar*” yang berarti berbuka puasa, “*futhur*” yang berarti sarapan pagi, serta “*al-fithr*” yang bermakna makan (Iin Mutmain, 2020).

Pada hari raya Idulfitri, umat Islam tidak diperbolehkan berpuasa, melainkan diwajibkan untuk makan atau berbuka. Karena itulah hari tersebut dinamakan “*Idul fithr*” yang bermakna hari kembali berbuka atau hari makan bersama. Sementara itu, zakat fitrah merupakan sedekah wajib yang ditunaikan di penghujung bulan Ramadan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, hamba sahaya maupun orang merdeka. Zakat fitrah tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki, melainkan karena seorang

muslim telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan (Muftisany, 2021).

Di Indonesia, zakat fitrah umumnya ditetapkan sebesar 2,5 kg. Namun, karena masyarakat lebih familiar menggunakan liter sebagai satuan ukuran bahan makanan pokok, maka 3,5 liter beras dianggap setara dengan 2,5 kg. Atas pertimbangan praktis, jumlah tersebut biasanya dibulatkan menjadi 4 liter per orang. Zakat fitrah sendiri dapat ditunaikan dalam bentuk berbagai makanan pokok, seperti beras, kurma, gandum, tepung, jagung, sagu, ubi, maupun kismis (Muiz & Hidarya, 2022).

### **3. Infak**

Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Dalam perspektif syariah, infak merujuk pada tindakan menyisihkan sebagian harta atau penghasilan seseorang untuk kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Berbeda dengan zakat yang memiliki batas minimum, infak tidak mengenal batas tertentu. Dengan demikian, setiap anggota umat, baik yang berpenghasilan besar maupun kecil, maupun yang berada dalam kondisi menguntungkan atau kurang, tetap dapat menunaikan infak (Shihab, 2004).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, infak merupakan dana yang disalurkan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat untuk kepentingan umum. Infak terbagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, infak yang bersifat wajib, contohnya zakat, kafarat, nazar, mahar, nafkah istri, dan lain-lain; kedua, infak sunnah, yaitu infak yang diberikan secara sukarela kepada fakir dan miskin sesama Muslim, untuk

penanganan bencana alam, pembangunan masjid, serta keperluan sosial lainnya.

Berdasarkan berbagai definisi sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa infak adalah perbuatan menyisihkan sebagian harta atau penghasilan seseorang untuk tujuan yang ditetapkan dalam Islam, tanpa adanya batasan minimum seperti halnya zakat. Setiap orang, tanpa memandang besarnya penghasilan atau kondisi keuangan, memiliki kesempatan untuk berinfak. Infak menunjukkan kesadaran individu terhadap tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Sedekah**

Sedekah, yang dalam bahasa Arab disebut “*shodaqoh*” adalah pemberian sukarela dari seorang Muslim kepada orang lain tanpa adanya paksaan, dengan jumlah dan waktu yang tidak terbatas. Sedekah dilakukan sebagai bentuk kebaikan, yang diharapkan mendapat ridha Allah SWT dan balasan hanya dari-Nya. Kata “sedekah” sendiri berasal dari istilah “*shidiq*,” yang berarti kebenaran. Secara bahasa, sedekah mengandung makna membenarkan sesuatu (Iskandar, 1994:35 dalam Emiarti & Rahmawatim, 2021).

Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan diberikan kepada siapa pun, meskipun orang tersebut belum mencapai batas nisab. Besarnya harta yang disedekahkan pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedekah menjadi wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diperoleh, dengan membagikan sebagian harta, baik berupa uang maupun barang, untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan meraih keridhaan-Nya.

Beberapa hal yang bisa membatalkan sedekah antara lain: *al-man* (mengungkit-ungkit), *al-aza* (menyakiti), di mana menyakiti di sini berarti menyakiti orang yang menerima sedekah, dan *ria* (memperlihatkan), yaitu bersedekah dengan tujuan memamerkannya kepada orang lain.

### 2.1.5 Program-Program BAZNAS

Dalam menyalurkan dana ZIS, BAZNAS Kota Bandar Lampung melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan sebelumnya. Program-program tersebut mencakup antara lain:

#### 1) Program Bandar Lampung Cerdas

Program ini merupakan inisiatif BAZNAS Kota Bandar Lampung yang difokuskan pada sektor pendidikan. Target dari program ini meliputi

- a. Pemberian beasiswa kepada pelajar atau santri kurang mampu serta anak yatim piatu yang berprestasi.
- b. Penyediaan perlengkapan belajar bagi pelajar atau santri yang membutuhkan.

#### 2) Program Bandar Lampung Peduli

Program ini menitikberatkan pada kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan sasaran utama sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, kebakaran, dan musibah lainnya.
- b. Menyalurkan bantuan kepada keluarga yang berdampak kondisi keterlantaran.
- c. Menyediakan santunan finansial atau dukungan spiritual bagi keluarga kurang mampu.
- d. Memberikan bantuan kepada musafir dan mualaf.

- e. Menyalurkan bantuan kepada penghuni panti jompo dan anak-anak panti asuhan.

### 3) Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan

Program ini menitikberatkan pada pengelolaan zakat produktif. Fokus utamanya adalah memberikan dukungan modal usaha, baik dalam bentuk dana maupun barang, kepada individu maupun kelompok masyarakat. Bentuk kegiatannya meliputi:

- a. Bantuan modal usaha bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- b. Bantuan modal usaha bagi kelompok pengrajin dan profesi tertentu.
- c. Bantuan modal usaha bagi komunitas nelayan.
- d. Bantuan modal usaha bagi kelompok peternak.

### 4) Program Bandar Lampung Sehat

Program ini merupakan inisiatif BAZNAS yang berfokus pada sektor kesehatan. Tujuan utamanya mencakup:

- a. Memberikan dukungan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu atau yang memerlukan, sesuai dengan kriteria tertentu.
- b. Menyediakan bantuan transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan akses untuk berobat.

## 2.2. Pemberdayaan Ekonomi

### 2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan sesuatu. Menurut Kamus Oxford (Hornby, 1948:282), pemberdayaan atau

“*empowerment*” diartikan sebagai pemberian kekuatan atau wewenang untuk bertindak, yakni memberikan kemampuan atau otoritas untuk melakukan sesuatu. (Mahmuda, 2020).

Menurut Jim Ife (1995), pemberdayaan merupakan usaha untuk menyediakan berbagai sumber daya, yang mencakup pengetahuan, peluang, dan keterampilan bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan arah masa depan mereka sendiri, sekaligus diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan individu lain (Anandhi & Muhtadi, 2023). Selanjutnya Menurut Friedman (1992), konsep pemberdayaan dalam konteks pembangunan alternatif menekankan pentingnya aspek politik, terutama otonomi dalam pengambilan keputusan, untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya individu, melalui partisipasi langsung, praktik demokrasi, serta pembelajaran sosial yang diperoleh dari pengamatan secara langsung (Agus Purbathin Hadi, 2019).

Menurut Sumodiningrat (2002), konsep pemberdayaan memiliki dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan primer, yaitu proses yang memberikan atau memindahkan sebagian kekuasaan, kemampuan, atau *power* kepada masyarakat atau individu sehingga mereka menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat diperkuat melalui pembangunan aset material yang mendukung kemandirian melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, yaitu proses yang menekankan pemberian stimulasi, dorongan, atau motivasi kepada individu agar mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri melalui dialog. Meskipun kedua kecenderungan ini tampak bertentangan pada level ekstrem, seringkali pencapaian kecenderungan primer membutuhkan melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Agus Purbathin Hadi, 2019).

Aziz dkk. (2005:117) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang miskin, marginal, atau terpinggirkan, sehingga mereka mampu menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, bernegosiasi, memengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhan hidup, membuat keputusan, serta ikut mengelola lembaga masyarakat dengan tanggung jawab demi memperbaiki kualitas hidup mereka (Mahmuda, 2020).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan memperkuat kemampuan dan potensi individu maupun kelompok masyarakat, terutama mereka yang tergolong miskin, terpinggirkan, atau terasing, agar memiliki akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatur masa depan mereka sendiri. Proses ini mencakup pemberian kesempatan dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, menyampaikan aspirasi, melakukan negosiasi, serta memberi kontribusi terhadap arah lembaga-lembaga sosial. Pada dasarnya, pemberdayaan diharapkan mampu membantu individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan mereka sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

### **2.2.2 Konsep Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi dapat dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses sumber daya ekonomi, mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan peluang di pasar, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup mereka (Chambers, 1993). Selain itu, menurut Gianjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi juga mencakup upaya memperkuat aspek-aspek budaya

untuk meningkatkan martabat dan derajat masyarakat yang saat ini masih sulit keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri (Kartasasmita, 1995:31).

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi mencakup penguatan kepemilikan atas faktor-faktor produksi, penguasaan dalam distribusi dan pemasaran, peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh upah yang layak, serta pengembangan akses masyarakat terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Semua ini harus dilaksanakan secara multidimensi, baik melalui inisiatif masyarakat itu sendiri maupun melalui kebijakan yang ada (Hutomo, 2000: 6 dalam Subkhi Mahmasani, 2020).

Berbagai strategi pemberdayaan ekonomi telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Salah satunya adalah melalui pendekatan keuangan mikro. (Yunus, 2009) Mengemukakan ide bahwa ketersediaan layanan keuangan dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendekatan ini umumnya mencakup penyediaan kredit mikro, asuransi, atau layanan pengiriman uang bagi masyarakat secara individual.

Mayoux, 2020 mengidentifikasi tiga dimensi utama mengenai pemberdayaan ekonomi:

1. Dimensi keuangan: berkaitan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya finansial, termasuk Tabungan, pinjaman dan asset produktif.
2. Dimensi manusia: mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi.
3. Dimensi sosial-politik: meliputi kemampuan untuk ikut serta dalam pengambilan Keputusan, membentuk organisasi, serta

memenuhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan ekonomi.

Alsop & Heinsohn, 2005 memperluas Pemahaman tentang pemberdayaan ekonomi secara lebih luas perlu memperhitungkan baik struktur peluang yang tersedia di lingkungan individu maupun kemampuan individu itu sendiri dalam memanfaatkan peluang tersebut.

Peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perkotaan umumnya terkait dengan aktivitas sektor informal dan bisnis mikro. Menurut (Chen, 2012), Mayoritas pekerja di perkotaan di negara berkembang bekerja di sektor informal, sehingga memerlukan pendekatan pemberdayaan yang berbeda dibandingkan dengan sektor formal. Dalam konteks ini, peran organisasi masyarakat dan kegiatan kolektif menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin di perkotaan. Penelitian (Brown & McGranahan, 2016) di sejumlah kota di negara berkembang memperlihatkan bahwa pengaturan terhadap pekerja informal, termasuk pemulung dan pedagang kaki lima, dapat meningkatkan keterlihatan, perwakilan, serta pendapatan mereka.

## **2.3. Masyarakat Miskin**

### **2.3.1. Definisi Masyarakat**

Dalam buku Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan (Abdul Syani, 2021) dijelaskan Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*musyarak*”, yang memiliki makna bersama-sama. Istilah ini kemudian berkembang menjadi masyarakat dalam bahasa Indonesia, yang berarti berkumpul, hidup bersama, saling

berinteraksi, dan memengaruhi satu sama lain. Dalam bahasa Inggris, istilah masyarakat dikenal sebagai *society*, yang berasal dari bahasa Latin “*socius*”, yang artinya teman atau kawan.

Peter L. Berger menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan kompleks dari interaksi manusia yang luas. Kesatuan kompleks ini terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait membentuk suatu keseluruhan. Menurut Berger, masyarakat tersusun dari bagian-bagian yang membangun hubungan sosial (Murdiyatmoko, 2007). Sementara itu, Koentjaraningrat dalam (Karinda dkk, 2024) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi atau bergaul satu sama lain.

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan terbentuk melalui interaksi dan hubungan yang dinamis antar anggotanya. Dengan demikian, masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan sosial yang kompleks, di mana setiap individu memegang peran penting dalam menjaga kesatuan sosial.

### **2.3.2. karakteristik Kemiskinan**

Konsep kemiskinan memperluas pemahaman ilmu sosial tentang kemiskinan, tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, tetapi juga mencakup kondisi ketidakberdayaan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, perlakuan hukum yang tidak adil, tingginya risiko terlibat dalam kriminalitas, serta terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Menurut Kartasasmita (1993), masyarakat miskin umumnya memiliki kemampuan berusaha yang rendah dan akses terbatas terhadap kegiatan ekonomi, sehingga mereka kerap tertinggal dibandingkan kelompok masyarakat lain yang memiliki potensi lebih besar. Berdasarkan kondisi tersebut, kemiskinan dapat dibedakan menjadi lima bentuk.

Adapun lima bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

#### 1. Kemiskinan Absolut

Seseorang dikategorikan mengalami kemiskinan absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Konsep ini berupaya menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan agar seseorang dapat bertahan hidup. Kendala utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan dan menilai kebutuhan minimum, karena hal ini dipengaruhi oleh tradisi, iklim, tingkat pembangunan negara, serta faktor ekonomi lainnya. Meski demikian, untuk hidup layak, manusia memerlukan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan fisik maupun sosialnya.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Seseorang disebut miskin secara relatif jika ia mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi masih berada di bawah standar hidup rata-rata masyarakat. Berdasarkan pengertian ini, garis kemiskinan akan berubah seiring dengan perubahan kondisi kehidupan masyarakat, sehingga konsep kemiskinan bersifat dinamis dan selalu ada. Dengan demikian, kemiskinan bisa dipahami sebagai bentuk ketimpangan sosial, artinya semakin lebar kesenjangan antara standar hidup kelas atas dan kelas bawah, semakin banyak pula orang yang dikategorikan miskin secara berkelanjutan.

### 3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang muncul akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya, yang biasanya terlihat dalam konteks sosial, budaya, atau politik yang kurang mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Dalam studi ilmu sosial, kemiskinan ini menjadi fokus utama, terutama di negara-negara penerima bantuan atau pinjaman dari institusi seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Selain itu, kemiskinan struktural juga dianggap sebagai akar dari ketiga tipe kemiskinan lainnya yang telah disebutkan.

### 4. Kemiskinan Situasional atau Kemiskinan Natural

Kemiskinan situasional umumnya muncul di wilayah-wilayah yang kurang kondusif, sehingga memicu terjadinya kondisi kemiskinan.

### 5. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merujuk pada bentuk kemiskinan yang timbul akibat pola perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat, biasanya berasal dari budaya atau tradisi yang cenderung menahan diri untuk meningkatkan taraf hidup secara lebih modern. Manifestasinya bisa berupa sikap malas, boros, kurang inovatif, serta ketergantungan pada pihak lain.

#### **2.3.3. Jenis-Jenis Kemiskinan**

Kemiskinan juga digolongkan jenisnya berdasarkan sifatnya. Adapun beberapa jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

#### 1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi akibat keterbatasan sumber daya alam, minimnya atau bahkan tidak tersedianya infrastruktur publik seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta kondisi tanah

yang kurang subur. Wilayah dengan kondisi seperti ini biasanya tidak memperoleh manfaat dari program pembangunan, sehingga tergolong sebagai daerah tertinggal.

## 2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kondisi miskin yang timbul akibat penerapan sistem modernisasi atau pembangunan, yang menimbulkan ketidakmerataan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan layanan. Jenis kemiskinan ini muncul sebagai dampak negatif dari konsep pembangunan (*developmentalism*), terutama di negara berkembang. Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat seringkali menghasilkan distribusi manfaat pembangunan yang tidak seimbang, misalnya sektor industri memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan sektor pertanian.

menyatakan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### 1) Kemiskinan yang bersifat kronis (*chronic poverty*)

Jenis kemiskinan ini ditandai terutama oleh terbatasnya infrastruktur transportasi, sehingga penduduk di daerah terpencil kesulitan mengakses layanan kesehatan, yang menyebabkan penyakit menahun tetap ada di kalangan mereka. Selain itu, kesempatan pendidikan mereka sangat minim. Kondisi ini sering berujung pada pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### 2) Kemiskinan yang bersifat sementara (*transient poverty*)

Kemiskinan yang timbul akibat suatu peristiwa atau masalah yang memengaruhi kehidupan seseorang. Saat kondisi hidupnya membaik, orang tersebut mampu menjalani kehidupan yang normal dan lebih sejahtera.

Beberapa indikator kemiskinan yang masih dipakai hingga kini untuk menilai kondisi kemiskinan di suatu daerah antara lain:

- 1) Tidak memiliki sumber daya produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, maupun keterampilan yang memadai.
- 2) Memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- 3) Bekerja dalam skala kecil dengan modal terbatas, biasanya berada di sektor informal.
- 4) Tinggal di daerah pedesaan, kawasan yang jauh dari pusat pertumbuhan regional, atau di wilayah tertentu di perkotaan.
- 5) Memiliki akses yang terbatas terhadap pemenuhan kebutuhan pokok serta pelayanan Kesehatan dan pendidikan yang layak sesuai standar kesejahteraan umum.

Perlu dicatat bahwa ciri-ciri kemiskinan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak bersifat mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai kebenaran universal, terutama ketika digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan atau membentuk kemiskinan.

#### **2.3.4. Kemiskinan di perkotaan**

Masalah pokok yang sering muncul di daerah perkotaan adalah kemiskinan. Fenomena ini telah menjadi persoalan signifikan sejak Indonesia berdiri sebagai negara. Kemiskinan di perkotaan bersifat kompleks, tidak hanya dilihat dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan structural (Wratten, 1995). Bank Dunia (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan di daerah perkotaan terjadi ketika rumah tangga tidak mampu memenuhi standar hidup minimum yang ditetapkan melalui garis kemiskinan (Sankof et al., 2005).

Suparlan (1984) juga menyampaikan pandangannya terkait kemiskinan di perkotaan. Ia menyatakan bahwa kemiskinan

perkotaan merupakan masalah yang terselubung dan kompleks, dengan dampak sosial dan budaya yang tidak hanya mencerminkan berbagai persoalan sosial di kota tersebut, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi di wilayah pedesaan (Marliati A. Harsono, 2005). Kemiskinan perkotaan merupakan salah satu dimensi dari kemiskinan nasional. Sebagai fenomena yang telah ada sejak beberapa abad lalu, penduduk kota yang kurang beruntung menjadi masalah sosial signifikan, dengan tingkat kemiskinan yang terus meningkat dan menjadi perhatian serius.

Kemunculan kemiskinan di kawasan perkotaan terkait dengan kurangnya keteraturan pemerintah dalam mengatur masyarakat. Selain menghadapi tantangan yang cukup kompleks, keberagaman penduduk perkotaan juga menjadi faktor yang memengaruhi penanganan kemiskinan. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif mendorong terbentuknya budaya kemiskinan kultural. Kedua faktor tersebut kemudian menghasilkan kelompok masyarakat miskin yang semakin terpinggirkan. Menurut (Mardiah et al., 2024) setidaknya ada tiga kategori kelompok yang termasuk dalam kemiskinan di daerah perkotaan:

- 1) Pekerja informal: terdiri dari masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti tukang parkir yang tidak resmi, pedagang kaki lima, dan pemulung yang cenderung rentan terhadap kondisi sosial dan ekonomi.
- 2) Pengemis: individu yang meminta-minta untuk mendapatkan belas kasihan. Kelompok ini tidak termasuk pekerja karena aktivitas utamanya adalah meminta sumbangan atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa melakukan pekerjaan.
- 3) Penghuni *slum area*: kelompok ini memiliki karakteristik yang kompleks dan beragam. *Slum area* merupakan wilayah yang kotor, tidak layak huni dan dihuni oleh individu dengan perilaku yang dianggap tidak normal atau menyimpang.

Seperti halnya kota besar lainnya, Kota Bandar Lampung juga menghadapi masalah tingginya tingkat kemiskinan. Kota ini menjadi tujuan utama para migran dari kabupaten sekitarnya, khususnya dari daerah pedesaan. Dorongan migrasi tersebut dipicu oleh alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas sektor pertanian, serta harapan masyarakat terhadap peluang ekonomi yang lebih baik di perkotaan. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk akibat migrasi ini tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan formal yang cukup, sehingga tercipta kawasan-kawasan kemiskinan baru.

Kemiskinan di Kota Bandar Lampung tidak merata di seluruh wilayah. Menurut penelitian Nurfatriani dan Iskandar (2020), kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah pinggiran kota, khususnya di Kecamatan Telukbetung Selatan, Panjang, dan Sukarame. Kondisi ini terkait dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas publik, serta adanya pemukiman kumuh yang terkonsentrasi di wilayah pesisir dan sepanjang bantaran sungai.

Kemiskinan di Kota Bandar Lampung memiliki sifat yang kompleks dan bersifat multidimensi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur sosial, demografi, dan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berusaha menanggulangi masalah kemiskinan ini, namun hingga kini tingkat kemiskinan di Bandar Lampung masih tergolong tinggi.

## **2.4. Landasan Teori**

### **2.4.1. Teori Modal Sosial**

Dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993:36) Robert Putnam menjelaskan modal sosial sebagai “*features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and co-operation for mutual benefit*”

modal sosial merupakan karakteristik organisasi sosial, seperti jaringan, aturan, dan tingkat kepercayaan, yang mendukung terjadinya koordinasi dan kerja sama demi keuntungan bersama (Fisher & Hamilton, 1996).

Putnam memandang modal sosial sebagai kumpulan asosiasi horizontal antarindividu yang memiliki pengaruh terhadap produktivitas hubungan antarwarga (*civic angengement*) serta norma-norma sosial. Konsep Putnam didasarkan pada dua asumsi utama: pertama, jejaring dan norma sosial saling terkait secara empiris; kedua, jejaring dan norma sosial tersebut memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, ciri utama modal sosial menurut Putnam adalah kemampuannya memfasilitasi koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan di antara anggota suatu organisasi.(Putnam, 1995).

Berdasarkan hasil penelitian dalam buku tersebut Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian pertama, adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan (*trust*) memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial. Hal ini terlihat dari fakta bahwa hubungan antarindividu yang saling mempercayai dalam suatu jaringan sosial mampu memperkuat norma-norma yang mendorong sikap saling membantu. Ketiga, keberhasilan yang diperoleh melalui kerja sama sebelumnya dalam jaringan tersebut akan memotivasi kelanjutan kerja sama di masa mendatang. Selain itu, menurut Putnam, modal sosial juga berperan dalam menjembatani perbedaan antara kelompok dengan ideologi yang berbeda serta memperkuat

konsensus mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat (Syahra, 2003).

Teori modal sosial menurut Putnam dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui lembaga zakat berlangsung. Putnam menyatakan bahwa modal sosial mencakup pola interaksi sosial berupa jaringan, norma, dan tingkat kepercayaan yang mendorong tindakan kolektif guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, hal tersebut dimaknai sebagai kekuatan bersama yang dikembangkan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di wilayah tersebut. BAZNAS Kota Bandar Lampung tidak hanya berperan sebagai pengumpul dan penyalur zakat, tetapi juga sebagai penghubung yang membangun jaringan sosial antara muzakki, mustahik, dan berbagai pemangku kepentingan. Dari perspektif Putnam, modal sosial merupakan kumpulan asosiasi horizontal antarindividu yang memiliki pengaruh terhadap produktivitas masyarakat setempat (Alfiansyah, 2023). BAZNAS Kota Bandar Lampung berperan dalam membangun asosiasi horizontal melalui program-program pemberdayaan yang mendorong masyarakat miskin untuk berperan aktif sebagai pelaku, bukan sekadar penerima bantuan.

Aspek kepercayaan menurut teori Putnam memiliki peranan penting dalam menilai efektivitas BAZNAS Kota Bandar Lampung. Lembaga ini perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan mengelola zakat secara transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan mustahik melalui berbagai program pemberdayaan. Selain itu, aspek norma sosial juga tampak jelas dalam kegiatan BAZNAS Kota Bandar Lampung, yang berlandaskan nilai-nilai Islam mengenai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam norma operasional program-program

pemberdayaan ekonomi, seperti paket sembako, bantuan bagi korban bencana, dan dukungan terhadap pengembangan UMKM.

Aspek jaringan sosial menurut Teori Putnam dapat dilihat melalui praktik BAZNAS Kota Bandar Lampung yang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat. Kerja sama ini bertujuan menciptakan lingkungan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin di wilayah Kota Bandar Lampung. Konsep pemberdayaan ini secara mendasar berfokus pada penyerahan kewenangan melalui peningkatan modal sosial komunitas agar lebih efektif. Pendekatan ini sejalan dengan upaya BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk menggeser paradigma dari sekadar kegiatan amal menjadi strategi pemberdayaan dalam rangka mengurangi kemiskinan perkotaan.

Penelitian ini juga memanfaatkan teori modal sosial Putnam untuk menganalisis cara BAZNAS Kota Bandar Lampung mendorong partisipasi masyarakat (*civic engagement*) di kalangan warga miskin perkotaan. Melalui program pemberdayaan ekonomi, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat secara pasif, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Hal ini pada gilirannya memperkuat kohesi sosial serta mendukung stabilitas demokrasi di tingkat kota, sejalan dengan pandangan Putnam mengenai keterkaitan antara modal sosial, kinerja ekonomi, dan kualitas demokrasi.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

| No. | Nama, tahun, judul penelitian                                                                                                                                 | Metode penelitian dan variabel                                                                                                                                 | Kesimpulan/ hasil                                                                                                                                                                                                                                                                             | Persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | (Wahyu Indarni, Muhammad Arwan Rosyadi, 2024) Peran Pengelolaan Zakat Sebagai Lembaga Sosial Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Dompus) | <b>Metode:</b> metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.<br><b>Variabel:</b> peran BAZNAS Dompus, lembaga sosial, fungsi pemberdayaan, charity/bantuan. | Hasil dari penelitian ini adalah peran BAZNAS Dompus sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan Masyarakat lebih dominan pada peran charity (bantuan langsung) di banding peran pemberdayaan. Selanjutnya dinamika peran BAZNAS Dompus terbagi dalam dua kegiatan yaitu pengumpulan dan | <b>Persamaan:</b> sama-sama meneliti tentang peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat dan upaya pemberdayaan masyarakat. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Berfokus pada peran lembaga zakat dalam pemberdayaan masyarakat.<br><b>Perbedaan:</b> lokasi penelitian yang |

|  |  |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>pendistribusian zakat.</p> <p>Pendistribusian sejak 2019-2023 masih bersifat pasif, sementara pengumpulan dana zakat mengalami perkembangan.</p> | <p>berbeda.</p> <p>Penelitian ini berfokus pada fungsi pemberdayaan secara umum, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih spesifik menekankan pada pemberdayaan ekonomi.</p> <p>Penelitian ini menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu dan teori struktural fungsional Robert K. Merton.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan teori modal sosial Pierre Bourdieu dan</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

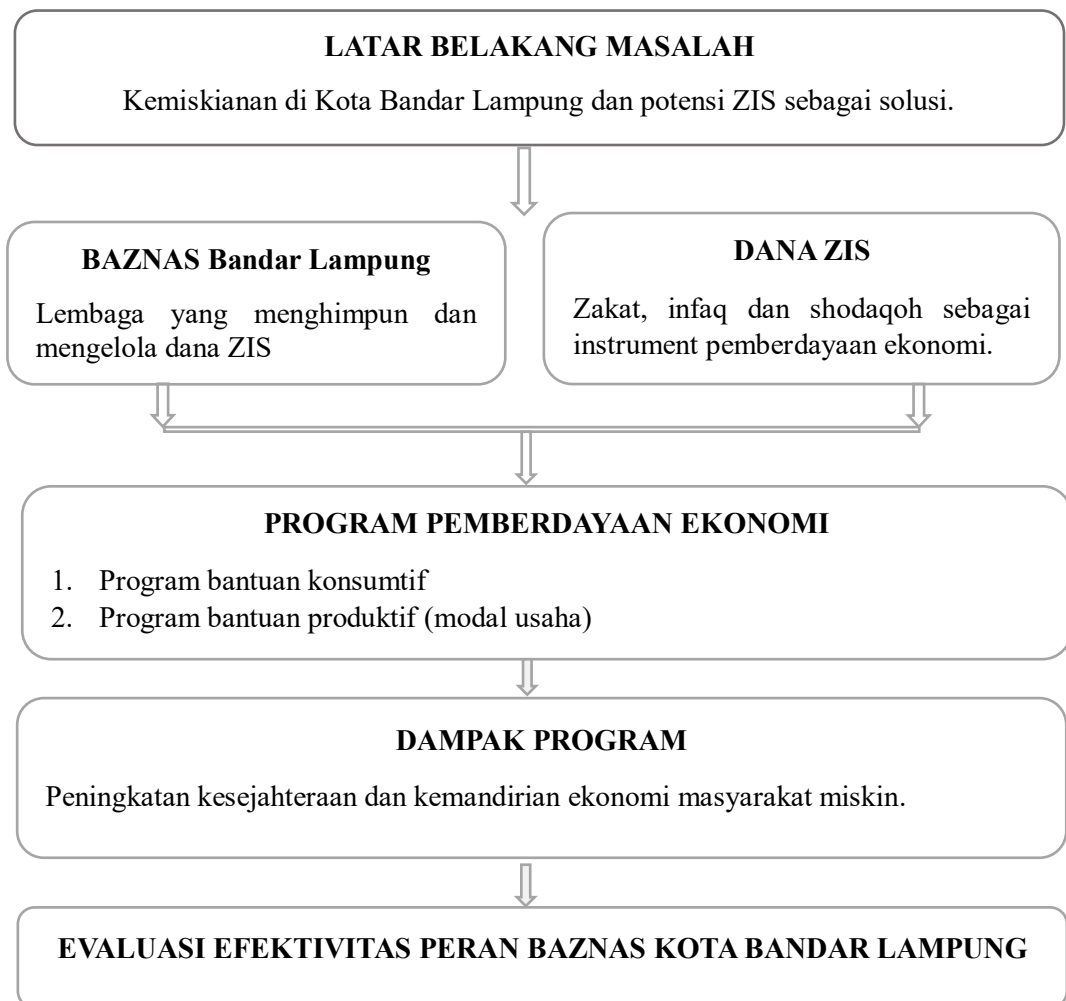
|    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | teori pemberdayaan Paulo Friere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | (Mashur et al., 2022)<br>(Mashur et al., 2022)<br>Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam) | <b>Metode:</b> kualitatif<br><b>Variabel:</b> peran Baznas, bantuan modal, bantuan di bidang kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesadaran Masyarakat. | Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS berkontribusi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program konsumtif dan produktif. Program bantuan BAZNAS dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat. BAZNAS berperan dalam edukasi dan pengembangan ekonomi islam. | <b>Persamaan:</b> fokus pada peran BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif. Dan menganalisis distribusi dana ZIS untuk pengentasan kemiskinan.<br><b>Perbedaan:</b> lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada pengembangan ekonomi islam, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada |

|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | masyarakat miskin.<br>Penelitian ini tidak membahas secara detail mengenai mekanisme penyaluran dana ZIS.                                                                                                                                                                      |
| 3. | (Khairi et al., 2025)<br>Peran Baznas Kampar Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Ridan Permai. | <b>Metode:</b> metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.<br><b>Variabel:</b> variabel utamanya adalah peran Baznas. Sedangkan variabel pendukung berupa program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan Baznas. Tantangan | Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS memiliki peran strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Ridan Permai melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pemerian bantuan hewan ternak kambing. Program berhasil meningkatkan pendapatan dan kemandirian | <b>Persamaan:</b> kedua penelitian ini memiliki fokus penelitian yang sama yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat miskin melalui penyaluran dana ZIS. Sama-sama menekankan peran BAZNAS.<br><b>Perbedaan:</b> lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian ini berlokasi di |

|  |  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program-program tersebut. | ekonomi masyarakat dhuafa, serta mendorong solidaritas sosial antar warga desa. Meskipun demikian, BAZNAS menghadapi tantangan termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan kolaborasi yang lebih baik antara BAZNAS dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. | daerah pedesaan, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan berlokasi di perkotaan. Jenis program yang dijalankan oleh BAZNAS berbeda, pada penelitian ini jenis program yang dijalankan oleh BAZNAS di Desa Ridan Permai lebih berfokus pada sektor pertanian dan peternakan, sedangkan pada BAZNAS Bandar Lampung berfokus pada program penyaluran dana secara |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | konsumtif dan produktif. |
|--|--|--|--|--------------------------|

## 2.6. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. kerangka berpikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Menurut John W. Creswell dalam bukunya *Research Design*, metode kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap isu-isu sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif memerlukan usaha yang cukup intensif, seperti merancang pertanyaan dan prosedur penelitian, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, melakukan analisis secara induktif dari tema-tema khusus menuju tema yang lebih umum, serta menafsirkan makna dari kata-kata. Selain itu, struktur laporan penelitian bersifat fleksibel, dan setiap pihak yang terlibat perlu menerapkan pendekatan induktif dengan fokus pada pemahaman makna subjektif dan menjelaskan kompleksitas masalah yang ada (Mackiewicz, 2018).

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait peran BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di wilayah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman subjektif para partisipan, menafsirkan makna yang muncul, serta memahami kompleksitas situasi secara menyeluruh dalam konteks yang alami.

BAZNAS Kota Bandar Lampung telah menyalurkan dana ZIS kepada mustahik di wilayah tersebut. Meski demikian, data BPS menunjukkan

bahwa jumlah penduduk miskin di Bandar Lampung masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mustahik. Pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk menjawab permasalahan ini, karena mampu mengevaluasi peran BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berguna untuk menentukan batasan objek yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar peneliti tidak terbebani oleh banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan. Penetapan fokus penelitian diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh terkait kondisi ekonomi dan sosial, sehingga studi kualitatif dapat lebih terarah dan peneliti mampu memilah data mana yang relevan dan mana yang tidak (Moleong:127 dalam (Hilmi et al., 2018).

Fokus penelitian ini mencakup analisis mengenai peran BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin di kota tersebut, serta evaluasi terhadap sistem penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dijalankan oleh BAZNAS. Evaluasi penyaluran dana ZIS meliputi model dan bentuk distribusi yang diterapkan, mekanisme pendistribusian, serta proses pengelolaan dan transfer dana. Selain itu, penelitian ini juga menilai dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima dana ZIS, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi BAZNAS dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, baik hambatan internal maupun eksternal.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi merupakan lokasi di mana kegiatan penelitian dijalankan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, yang termasuk dalam wilayah operasional BAZNAS Kota Bandar Lampung, lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat. Pemilihan lokasi ini sangat tepat karena BAZNAS memiliki sistem dan fasilitas yang terstruktur dengan baik untuk pengelolaan zakat, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat. Kemudahan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan zakat BAZNAS, baik melalui jalur daring maupun luring, turut mendukung kelancaran pengumpulan data melalui observasi langsung. Penelitian ini fokus pada mustahik sebagai penerima dana ZIS.

### **3.4. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.4.1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui metode pengumpulan seperti wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, jumlah narasumber tidak ditetapkan sejak awal, karena begitu informasi yang diperoleh sudah memadai, tujuan penelitian dianggap tercapai. Oleh sebab itu, konsep sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pemilihan narasumber dan konteks sosial tertentu yang mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

### 3.4.2. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung, umumnya berupa dokumentasi atau arsip penting. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup: (1) buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, dan (2) dokumen resmi mengenai kondisi objektif di BAZNAS Kota Bandar Lampung yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian.

Penentuan informan yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, artinya dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan sampel tidak mengacu pada perhitungan statistik. Fokus utama peneliti kualitatif adalah memperoleh informasi yang lengkap dengan memperhatikan variasi yang ada, bukan sekadar jumlah sumber data.

## 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut diterapkan untuk mendapatkan data dan informasi yang saling melengkapi terkait peran BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung.

### 3.5.1. Wawancara/interview

Wawancara merupakan bentuk percakapan tatap muka antara dua pihak yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Metode ini, yang juga dikenal sebagai interview, dapat dipahami secara sederhana sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk mengumpulkan informasi dari pihak yang diwawancarai (Nasution, 2009). Dalam penelitian ini, informan kunci terdiri dari mustahik yang

menerima penyaluran ZIS serta staf atau tenaga kerja BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan tujuan penelitian, wawancara dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Wawancara Tak Terpimpin

Wawancara tidak terpimpin adalah proses tanya jawab di mana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan percakapan menuju topik-topik utama yang menjadi fokus penelitian dengan informan

2) Wawancara Terpimpin

Wawancara terpimpin dilakukan dengan menggunakan Paduan yang memuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti.

3) Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin merupakan gabungan antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin. Dalam jenis ini, pewawancara menyiapkan pokok-pokok masalah penelitian, namun selama wawancara berlangsung, arah percakapan mengikuti situasi. Pewawancara tetap harus mampu membimbing informan apabila pembicaraan menyimpang dari topik (Arikunto, 2010).

### 3.5.2. Observasi

Metode observasi dalam pengumpulan data memiliki karakteristik yang membedakannya dari teknik lain, seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner biasanya fokus pada individu, observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai aspek alam lainnya (Sutrisno, 2001). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan baik secara partisipatif maupun non-partisipatif. Pengumpulan data dilakukan dengan

langsung terjun ke lapangan dan mengamati objek penelitian secara langsung.

### **3.5.1. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari istilah “dokumen” yang berarti benda-benda tertulis (Sutrisno, 2001). Dengan demikian, metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada hal-hal atau variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain-lain yang memiliki kaitan dengan kegiatan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menata data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami dan hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain (Dewi Sadiyah, 2015). Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis kualitatif, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dengan cara mengorganisasi data, memilahnya, kemudian mengelola, menggabungkan, serta mencari pola-pola sehingga dapat diinterpretasikan dan dikomunikasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga pola atau karakteristik yang terkandung di dalamnya dapat lebih mudah dikenali dan dimanfaatkan untuk menemukan solusi atas permasalahan, khususnya dalam konteks penelitian (Panjaitan, 2017).

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

### **3.6.1. Reduksi Data**

Dalam proses ini, peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan data mana yang akan dikodekan, memilih data yang relevan, serta membuang data yang tidak diperlukan. Data yang dipilih meliputi ringkasan, narasi, serta informasi yang sedang berkembang.

### **3.6.2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah proses menata sekumpulan informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh masalah penelitian dipilih sesuai kebutuhan, kemudian diklasifikasikan dan dibatasi ruang lingkupnya. Dengan penyajian data ini, diharapkan dapat menghadirkan informasi yang jelas, terperinci, dan substansial, lengkap dengan data pendukungnya.

### **3.6.3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan**

Menarik kesimpulan sebenarnya merupakan bagian dari satu proses yang menyeluruh. Kesimpulan tersebut juga diperiksa kebenarannya selama proses berlangsung melalui tinjauan ulang terhadap catatan lapangan yang tersedia (Panjaitan, 2017).

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1. Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat di wilayah Bandar Lampung. Lembaga ini merupakan bagian dari jaringan BAZNAS Pusat yang memiliki tujuan meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan mereka yang kurang mampu (Aisyah, 2024).

BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk mengikuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II OT/1585/2014 tanggal 3 September 2014 mengenai tindak lanjut pembentukan BAZNAS di tingkat daerah (Wijaya, 2023). Kemudian, pemerintah mengesahkan pembentukan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 954/1.06/HK/2015 tanggal 15 September 2015 untuk Masa Bhakti 2015-2020. Selanjutnya, dilakukan perubahan dan pembaruan pengurus sesuai Masa Bhakti baru, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 106/1.06/HK/2017 tanggal 16 Februari 2017, yang menetapkan pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk Periode 2017-2022 (Aisyah, 2024). Setelah masa kepengurusan BAZNAS Kota Bandar Lampung periode 2017-2022 berakhir, dibentuklah kepengurusan baru untuk periode 2022-2027. Pembentukan ini merujuk pada Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 494/1.02/HK/2022 yang menetapkan Ketua dan Wakil

Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung, serta Surat Keputusan Walikota Nomor 490/1.02.HK/2022 yang mengangkat Dewan Pengawas BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk periode yang sama (Puskas BAZNAS, 2021).

#### 4.2. Logo dan Visi Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung mencerminkan tujuan dan arah lembaga, sekaligus menegaskan komitmen BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam mengelola dan menyalurkan zakat secara efektif dan transparan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. berikut ini adalah logo BAZNAS Kota Bandar Lampung:



Gambar 4.1. Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung

Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung memadukan berbagai elemen yang mencerminkan visi dan misi lembaga. Dominasi warna hijau pada logo melambangkan keberkahan, pertumbuhan, dan harapan. Warna ini juga sering dikaitkan dengan zakat dan kegiatan sosial, menggambarkan peran BAZNAS dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Selain itu, logo ini menampilkan teks “BAZNAS Kota Bandar Lampung” dengan huruf yang jelas dan mudah dibaca, menunjukkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan operasional lembaga. Desain logo dibuat agar mudah dikenali dan diingat masyarakat, sekaligus menjadi identitas yang kuat bagi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”

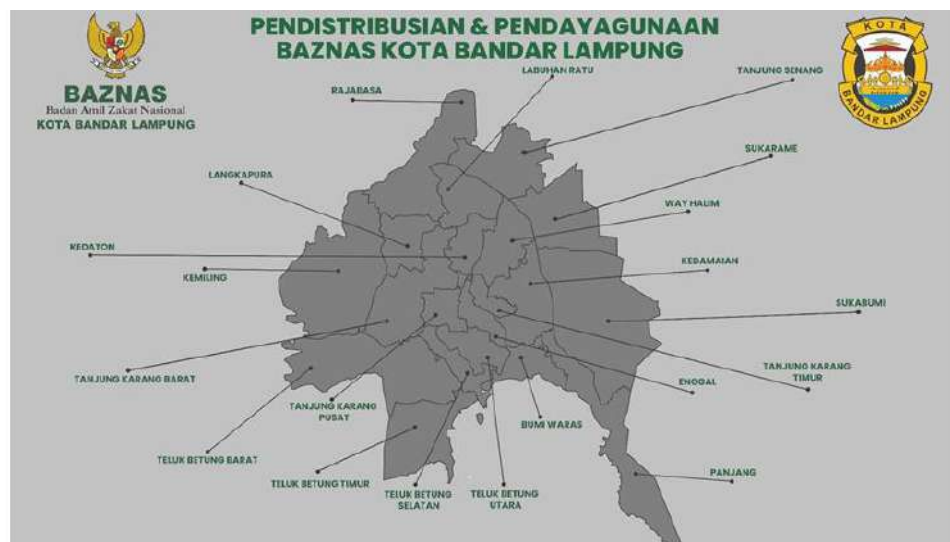
Visi ini menunjukkan tekad BAZNAS untuk menghadirkan program pemberdayaan dan layanan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Lembaga ini berusaha mengenali kebutuhan utama masyarakat dan menciptakan solusi yang efektif serta efisien. Visi tersebut juga mencerminkan komitmen jangka panjang untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sambil tetap menjunjung nilai-nilai dasar dalam pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan visi ini, misi BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat dirumuskan sebagai berikut (BAZNAS Kota Bandar Lampung, 2025):

1. Membangun BAZNAS Kota Bandar Lampung yang kuat, percaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan meningkatkan pengumpulan ZIS-DKSL secara massif dan terukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DKSL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan.
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung.
7. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung.
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional

Logo, visi, dan misi BAZNAS Kota Bandar Lampung mencerminkan dedikasi lembaga ini dalam mengelola zakat dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Logo BAZNAS juga menjadi pengingat akan pentingnya sikap dermawan, kepedulian terhadap sesama, serta dukungan terhadap berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.

#### 4.3. Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung

BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat di seluruh wilayah administratif Kota Bandar Lampung, yang berada di Provinsi Lampung, Indonesia. Kewenangan dan tugas tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat (UU RI NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, 2011). Berikut ini adalah peta wilayah yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung:



Gambar 4.2. Wilayah yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung

#### 4.4. Tugas Dan Fungsi Kepengurusan BAZNAS Kota Bandar Lampung



Gambar 4.3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung

##### 1. Ketua

Ketua bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

##### 2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh seorang Wakil Ketua yang memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua I. Tugas pokoknya adalah mengatur dan mengelola kegiatan pengumpulan zakat sesuai dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kota Bandar Lampung, Pasal 11. Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Pengumpulan melaksanakan berbagai peran, antara lain:

- a) Menyusun strategi untuk kegiatan pengumpulan zakat.
- b) Mengelola dan mengembangkan basis data para muzaki.

- c) Melaksanakan kegiatan promosi dan kampanye zakat.
- d) Menjalankan dan mengawasi proses pengumpulan zakat.
- e) Memberikan layanan yang optimal kepada muzaki.
- f) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengumpulan zakat.
- g) Menyusun laporan serta mempertanggungjawabkan kegiatan pengumpulan zakat.
- h) Menerima dan menindaklanjuti keluhan atau complain terkait layanan zakat.
- i) Melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat kota.

### **3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)**

Bidang ini dipimpin oleh seorang Wakil Ketua dengan jabatan Wakil Ketua II. Sesuai Pasal 14 Peraturan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung, bidang ini bertugas mengelola, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat. Dalam pelaksanaannya, bidang pendistribusian memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a) Menyusun strategi untuk pendistribusian dan pemanfaatan zakat.
- b) Melaksanakan pengelolaan serta pengembangan data penerima zakat (mustahik).
- c) Menjalankan serta mengawasi proses pendistribusian dan pemanfaatan zakat bagi mustahik
- d) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
- e) Menyusun laporan serta pertanggungjawaban terkait pendistribusian dan pemanfaatan zakat.
- f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pemanfaatan zakat di tingkat kota.

#### **4. Wakil Ketua III (Bidang Keuangan dan Pelaporan)**

Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kota Bandar Lampung, bagian ini melaksanakan fungsinya dengan menjalankan tugas-tugas tertentu:

- a) Persiapan dalam menyusun strategi pengelolaan zakat pada tingkat kota.
- b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota Bandar Lampung
- c) Pelaksanaan evaluasi tahunan serta evaluasi lima tahunan terhadap rencana pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung secara menyeluruh.
- e) Penerapan sistem akuntansi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- f) Penyusunan Laporan Keuangan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- g) Persiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat pada tingkat kota.

#### **5. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)**

Bagian Administrasi, SDM, dan Umum berada di bawah tanggung jawab Wakil Ketua IV. Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kota Bandar Lampung, bagian ini memiliki tugas untuk mengelola sumber daya amil, administrasi kantor, komunikasi, urusan umum, serta menyusun rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, bagian Administrasi, SDM, dan Umum melaksanakan beberapa fungsi berikut:

- a) Menyusun rencana dan strategi pengelolaan Amil Zakat di tingkat kota.
- b) Melaksanakan perencanaan operasional Amil BAZNAS di kota.
- c) Melaksanakan proses rekrutmen Amil BAZNAS kota.
- d) Melaksanakan program pengembangan kapasitas Amil BAZNAS kota.

- e) Menangani kegiatan administrasi perkantoran BAZNAS kota.
- f) Menyusun strategi komunikasi dan pengelolaan hubungan masyarakat BAZNAS kota.
- g) Melakukan pengadaan, pencatatan, perawatan, pengendalian, serta pelaporan aset BAZNAS kota.
- h) Memberikan rekomendasi terkait pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kota.

## **6. Dewan Pengawas**

Berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas BAZNAS Kota Bandar Lampung:

- a) Memberikan masukan dan saran kepada pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut.
- b) Memantau perkembangan kegiatan BAZNAS Kota Bandar Lampung serta menyampaikan pendapat dan rekomendasi kepada Kepala Daerah mengenai isu penting yang berkaitan dengan pengelolaan BAZNAS.
- c) Menyampaikan laporan kinerja BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung.
- d) Memberikan arahan kepada pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan lembaga, melakukan pembinaan, serta mengevaluasi dan menilai kinerja keuangan maupun non-keuangan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan visi dan misi lembaga.
- e) Mengajukan inovasi atau langkah-langkah terobosan untuk meningkatkan pengelolaan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

## **7. Kepala Sekretariat**

Kepala sekretariat memegang tanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dan wewenang di setiap bagian, mencakup pengelolaan pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan, pengelolaan keuangan dan pelaporan, serta urusan sumber daya manusia dan administrasi umum.

## **8. Bagian pengumpulan**

Bagian pengumpulan bertugas untuk mendukung Wakil Ketua I dalam melaksanakan berbagai kegiatan administrasi.

## **9. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Bagian ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Wakil Ketua II serta menangani kegiatan administrasi dan urusan tata usaha di bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

## **10. Bagian Keuangan dan Pelaporan**

Bagian ini bertugas mendukung pelaksanaan tugas Wakil Ketua III serta menangani administrasi dan urusan tata usaha terkait perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

## **11. Bagian SDM dan Umum**

Bagian SDM dan Umum bertugas mendukung pelaksanaan tugas Wakil Ketua IV serta mengelola kegiatan administrasi perkantoran, tata usaha, dan urusan umum.

## VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

1. BAZNAS Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola zakat dengan mengimplementasikan strategi identifikasi dan penjangkauan masyarakat yang sistematis melalui kerjasama dengan BPS dan penerapan standar *had kifayah*, serta mengembangkan sistem Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melalui masjid-masjid di seluruh Bandar Lampung. Namun, efektivitas peran ini masih terbatas karena hanya mampu menjangkau maksimal 30% dari total masyarakat miskin yang ada, dan belum optimalnya pemanfaatan jaringan masjid karena dari 800-1000 masjid yang ada, belum semuanya menjadi UPZ. Program pemberdayaan yang dijalankan terdiri dari program produktif berupa bantuan modal usaha UMKM dan program konsumtif seperti bantuan sembako, namun masih didominasi oleh program konsumtif (70%) yang menghambat fungsi transformatif dalam mengubah mustahik menjadi muzakki.
2. Dampak penyaluran dana ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin menunjukkan hasil yang beragam. Program produktif berupa pinjaman modal usaha berhasil mempertahankan keberlanjutan usaha pelaku UMKM dan memberikan kontribusi positif terhadap pembiayaan pendidikan anak, meski dampak terhadap peningkatan pendapatan masih terbatas dan bahkan mengalami penurunan akibat faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Program konsumtif memberikan manfaat berupa pengurangan beban pengeluaran keluarga penerima, namun dampaknya bersifat temporer dan tidak

memberikan perubahan struktural pada kondisi ekonomi karena frekuensi distribusi yang terbatas (1-3 kali per tahun) dan tidak ada mekanisme pemberdayaan jangka panjang. BAZNAS Kota Bandar Lampung juga mengakui belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program secara ilmiah, sehingga transformasi mustahik menjadi muzakki belum dapat dibuktikan secara konkret.

3. Hambatan utama yang dialami BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin meliputi keterbatasan operasional seperti tidak adanya kendaraan operasional dan infrastruktur teknologi yang belum optimal, ketidakseimbangan antara tingginya permintaan bantuan dengan keterbatasan dana yang terhimpun, serta kapasitas SDM yang belum memadai karena tidak semua staff bersertifikat amil zakat. Pengumpulan dana yang masih bergantung pada ASN menunjukkan keterbatasan dalam memperluas basis donatur, sementara ketiadaan divisi publikasi dan IT yang memadai menghambat sosialisasi program kepada masyarakat luas. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, BAZNAS Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya peningkatan kompetensi staff, diversifikasi pengumpulan dana melalui berbagai media, dan melibatkan mahasiswa magang untuk sosialisasi, namun upaya-upaya ini perlu dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang efektif di Kota Bandar Lampung.

## **6.2. Saran**

### **1. Bagi BAZNAS Kota Bandar Lampung**

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program-program pemberdayaan selanjutnya. BAZNAS Kota Bandar Lampung juga perlu mengaktifkan Kembali program bantuan produktif agar dampaknya lebih berkelanjutan dan mampu mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif. Selain itu BAZNAS Kota Bandar Lampung juga perlu mengoptimalkan potensi UPZ di masjid dan mushola yang ada di Bandar Lampung dengan memberikan pendampingan, pelatihan manajemen, dan mekanisme monitoring agar distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat miskin di sekitar masjid.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah disarankan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi program pengentasan kemiskinan dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung melalui mekanisme pertemuan rutin dan forum kolaborasi. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir, sehingga BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi akses BAZNAS Kota Bandar Lampung terhadap jejaring lembaga keagamaan, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat, guna memperluas cakupan program serta mendorong partisipasi masjid dan mushola dalam pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan analisis kuantitatif mengenai dampak jangka panjang program zakat produktif terhadap pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian juga dapat mengkaji perbandingan efektivitas antara bantuan konsumtif dan produktif dalam pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan, serta meneliti peran modal sosial secara lebih spesifik, misalnya dengan mengukur pengaruh jaringan sosial dan kepercayaan terhadap keberhasilan distribusi zakat. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi model kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan BAZNAS Kota Bandar Lampung, pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta, guna meningkatkan skala dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2021). Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan. PT. Bumi Aksara. Hal. 30.
- Adil, A. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik (Issue January).
- Agus Purbathin Hadi. (2019). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, 1987, 1–12. <http://suniscome.50webs.com/32> Konsep Pemberdayaan Partisipasi Kelembagaan.pdf
- Agussani. (2019). Desain Pemberdayaan Masyarakat Modern. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484>
- Aisyah, S. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DAN INFORMASI PRIBADI DALAM SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNAS (SiMBA)*.
- Alfiansyah, R. (2023). Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 41–51. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378>
- Alsop, R., & Heinsohn, N. (2005). Measuring empowerment in practice: Structuring analysis and framing indicators. *World Bank Policy Research Working Paper 3510*, February, 123. <https://doi.org/10.1037/e596892012-001>
- Anandhi, A., & Muhtadi. (2023). Peran Baznas dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(2), 118–128.
- BAZNAS Center of Strategic Studies. 2018. Kajian Had Kifayah. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). <https://puskasbaznas.com/publications/books/735-had-kifayah> 2018
- BAZNAS Kota Bandar Lampung. (2025). Profil BAZNAS. Diakses dari <https://kotabandarlampung.baznas.go.id/baznas-profile> diakses pada 18 juli 2025

- BAZNAS Kota Bandar Lampung. (2020, Juli). Perbarnas Kota Bandar Lampung 110 Nomor 02 tentang Kode Etik Amil BAZNAS Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- BPK, R. (2001). Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. 2017, 1–11. <http://www.helpa-prometheus.gr/διαγνωστικές-εξετάσεις-για-τον-καρκί/>
- BPK RI. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. *Demographic Research*, 2.
- Brown, D., & McGranahan, G. (2016). The urban informal economy, local inclusion and achieving a global green transformation. *Habitat International*, 53, 97–105. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.11.002>
- Budaya, A., & Nasution, S. A. (2021). Pengembangan Mandatori Zakat Dalam Sistem Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jill.v13i1.3036>
- Chen, M. A. (2012). *The Informal Economy : Definitions , Theories and Policies. August.*
- Dahlan, D. (2020). Pengembangan Makna Amil Zakat. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 1(1), 46–60.
- Emiarti, E., & Rahmawati, P. (2021). Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha. *SHARF: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 43–57.
- Fauzi, A., & Rahman, A. (2024). Potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Bima. *Jurnal Hukum, Ekonomi, Dan Bisnis Naras*, 5(2), 45–60.
- Fisher, J., & Hamilton, C. H. (1996). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 25(1), 124–135. <https://doi.org/10.1177/0899764096251009>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *KONSEP, APLIKASI, DAN PERILAKU AKUNTANSI TERHADAP ZAKAT ASET PADA PERUSAHAAN DAGANG ( STUDI PADA TOKO EMAS GAJAH DI SIDOARJO )*. 3(2), 91–102.
- Iin Mutmain. (2020). Fikih Zakat. In *Dirah* (Vol. 3).
- Johan, A. (2020). BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA *CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA. Sosio Informa*, 6(02), 114–132.
- Kartasmita Ginanjar, 1996. “Reaktualisasi Nilai-nilai Kepesantrenan”, Artikel (Dies Natalis XXXI IAI Cipayung, Tasikmalaya.
- Khairi, R., Winario, M., Zakir, M., Amalia, N., & Putri, B. (2025). *PERAN BAZNAS KAMPAR DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA RIDAN PERMAI*. 2, 38–46.

- Mackiewicz, J. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Mahmuda, M. (2020). Dakwah Dan Pemberdayaan. *Al-Hikmah*, 7(1), 9–20. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah>
- Mardiah, F., Islami, J., Irawan, M. F., & Pratama, I. N. (2024). *Meninjau Dampak Kemiskinan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu*. 13.
- Marliati A. Harsono. (2005). *Kemiskinan perkotaan: penyebab dan upaya penanggulangannya*.
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 634–639. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>
- Mayoux, L. (2020). Women's Empowerment Versus Sustainability? Towards a New Paradigm in Micro-finance Programmes 1. *Women and Credit*, 245–269. <https://doi.org/10.4324/9781003103233-19>
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Munif, F. (2020). Pengembangan Madrasah melalui Modal Sosial. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 84–98. <https://doi.org/10.24090/jk.v8i1.5133>
- Nurfatriani, F., & Iskandar, H. (2020). Analisis Spasial Kemiskinan Perkotaan di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 17(2), 137–155.
- Nurjihad. (2001). Implementasi Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum*, 8(17), 63–72.
- Nurjihad. (2001). Implementasi Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum*, 8(17), 63–72.
- Panjaitan, R. (2017). Metodologi Penelitian. In *Jusuf Aryani Learning*.
- Puskas BAZNAS. (2021). Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025. *Renstra-BAZNAS-2020-2025*, 318.
- Putnam, R. (1995). The Thriving Community, Social Capital, and Public Life. *World Economy and International Relations*, 4, 77–86. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-1995-4-77-86>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sankof, D., Zheng, C., & Lenert, A. (2005). Reversals of fortune. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*: Vol. 3678 LNBI. <https://doi.org/10.2307/j.ctv14npk3p.9>

- Shihab, M. Q. (2004). *TAFSIR AL-MISHBAH*.
- Subkhi Mahmasani. (2020). *Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. 274–282.
- Sugito, Hasbi, Y., Restu, A. K. D., Hendrawan Toni Taruno, Wawan, H., Maipita, I., Wahyudi, S. T., Nurizqi, A., Sekar, R., Afifatul, H., Pramesti, N. A. T., Bendesa, I. K. G., Wulandari, H., Aisyah, S., Yudhistira, S., Ratih, G. A. P. A., Utama, M. S., Yasa, I. N. M., Gustang, A., ... Pangiuk, A. (2018). Aplikasi Model Spatial Autoregressive Untuk Pemodelan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sma Sederajat Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. *Kajian Bidang Kesejahteraan Masyarakat*, 6(2), 287–301. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/download/4/4/%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/34273/26921>
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(4), 25–42. [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/\\_3\\_Bagong.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/_3_Bagong.pdf)
- Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22. <http://www.jurnalmasyarakatdanbudaya.com/index.php/jmb/article/view/256>
- Swedberg, R. (2018). The sociology of economic life, Third edition. The Sociology of Economic Life, <https://doi.org/10.4324/9780429494338> Third Edition, 1 543.
- UU RI NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, 66 37 (2011).
- Wahyu Indarni, Muhammad Arwan Rosyadi, A. N. (2024). *Peran Pengelolaan Zakat Sebagai Lembaga Sosial Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Dompus) : Volume 2, Edisi 1, 2024. 2.*
- Wijaya, A. (2023). Evaluasi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kota Bandar Lampung. *UIN Raden Intan*. <http://repository.radenintan.ac.id/31693/>
- Wratten, E. (1995). Conceptualizing urban poverty. *Environment & Urbanization*, 7(1), 11–38. <https://doi.org/10.1177/095624789500700118>
- Yunus, M. (2009). Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. *Social Change*, 39(2), 299–302. <https://doi.org/10.1177/004908570903900209>